

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Retribusi

Retribusi menurut UU Nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi:

a. Retribusi Jasa Umum.

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan:
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3) Retribusi Izin Gangguan;
 - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
 - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Munawir (1997, dalam Sutrisno 2013) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran. Definisi retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan disediakan pemerintah pada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis. Teori ekonomi mengatakan, harga barang atau layanan jasa yang diberikan pada masyarakat hendaknya didasarkan pada biaya (*marginal cost*), yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir (Devas,dkk 1989:95 dalam Handayani 2012).

Lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja, Menurut McQueen (1998 : 2) menerangkan bahwa: “Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian yang mudah dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif

tetap harus diberlakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995 : 84) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis;
- b. Ada imbalan langsung kepada membayar;
- c. Iurannya memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
- d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol;
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah. Seperti yang ungkapkan oleh Devas, dkk (1989 : 46) bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerimaan daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonom yang berarti, yang penting

adalah “wewenang di tepi” artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan di sana-sini. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi.

Menurut Devas, dkk. (1989 : 61-62), untuk mendukung keuangan daerah, berbagai pajak dan retribusi harus dinilai agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Prinsip prinsip atau indikator yang digunakan dalam penilaian pajak dan retribusi daerah.

- a. Hasil (*yield*) : yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak atau retribusi dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
- b. Keadilan (*equity*) : dasar pajak atau retribusi dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang.
- c. Efisiensi ekonomi : Pajak atau retribusi hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi.
- d. Kemampuan untuk melaksanakan (*ability to implement*) : suatu pajak atau retribusi haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun administratif.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*) : artinya harus jelas kepada daerah mana suatu

pajak/retribusi harus dibayarkan dan tempat memungut sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak/retribusi.

2. Pariwisata

a. Pengertian pariwisata

Pengertian Pariwisata Menurut Instruksi Presiden No. 19 Tahun 1969, Kepariwisataan adalah merupakan suatu kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah, dan iklim yang nyaman.

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Heriawan (2004), pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal

semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata mengandung unsur sementara dan perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek atau daya tarik wisata. Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah, tetapi apabila di sela-sela kegiatan mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata.

Berdasarkan pengertian beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha dan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dalam hal ini adalah retribusi dari sektor pariwisata

Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan, restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata,

souvenir, dan hiburan), dan usaha perjalanan wisata (travel agent atau pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah bagi provinsi DIY yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah 5 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dari sektor pariwisata :

1) Jumlah obyek wisata.

Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87, Obyek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Obyek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain. Suatu tempat/daerah agar dapat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi hal pokok berikut:

- a) *Adanya something to see*. Maksudnya adalah sesuatu untuk dilihat.
- b) *Adanya something to buy*. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli.

c) *Adanya something to do*. Maksudnya adalah sesuatu aktifitas yang dapat dilakukan di tempat itu.

Umumnya di beberapa daerah atau negara, untuk memasuki suatu Objek Wisata para wisatawan diwajibkan untuk membayar biaya masuk atau karcis masuk yang merupakan biaya retribusi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Objek Wisata tersebut. Beberapa Objek Wisata ada yang dikelola oleh Pemerintah dan ada pula yang dikelola oleh pihak swasta. Objek Wisata yang dikelola oleh pihak swasta dapat berupa Objek Wisata alami maupun buatan. (Sumber: Wikipedia.org)

Begitu juga dengan provinsi DIY yang dibagi dalam 5 Kabupaten/Kota dimana memiliki Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang memiliki masing-masing potensi yang cukup besar dan bisa diandalkan, khususnya wisata alam maupun budaya bahkan wisata buatan. Dengan demikian banyaknya jumlah onjek wisata yang ada maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di DIY, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

2) Jumlah wisatawan

Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan atau *tourist*. Batasan terhadap wisatawan juga sangat bervariasi, mulai yang umum sampai dengan yang khusus. Menurut Soekadijo (2000) wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari

tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya.

Maka wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara tanpa menetap untuk menikmati obyek wisata dan bersenang-senang semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi (pemanfaatan waktu luang untuk istirahat, santai dan bersenang-senang guna mengembalikan dan meningkatkan kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani sebagai akibat dan aktivitas pekerjaan sehari-hari) atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

3) PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga

yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Menurut Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto dalam buku Pengantar Ekonomi, semakin tinggi nilai barang/jasa akhir yang dihasilkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah propinsi atau kabupaten maka akan semakin tinggi pula perolehan PDRBnya dan nantinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB akan memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, PDRB dapat diartikan sebagai jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 (satu) tahun.

PDRB disebut juga sebagai suatu neraca regional di mana muatannya dapat dipisahkan sebagai PDRB sektoral pada sisi kiri

dan PDRB menurut penggunaan pada sisi kanan. Manfaat PDRB antara lain digunakan sebagai dasar penghitungan laju pertumbuhan ekonomi, untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan per kapita, dan sebagai indikator disparitas regional. Kemampuan pengelolaan unit ekonomi yang tinggi di suatu daerah/wilayah akan berdampak pada kemakmuran masyarakatnya, oleh karena itu angka PDRB juga digunakan sebagai alat pembanding tingkat kemakmuran antar daerah/ wilayah.

Dalam pengertian lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan teknologi (faktor produksi) di daerah/ wilayah tersebut. Kondisi terbatasnya sumber daya alam dan penyediaan faktor-faktor produksi serta kemampuan dalam pengelolaannya tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah/wilayah.

Perspektif tinjauan secara spasial PDRB melalui analisis antarregion menurut kabupaten/kota akan memberikan gambaran perbedaan pola tentang hasil-hasil pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya alam, kondisi infrastruktur,

dan faktor produksi yang tersedia beserta kemampuan manajemen pengelolaannya. Alhasil dari adanya perbedaan tersebut dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi antar kabupaten/ kota.

Kebijakan ekonomi disusun antara lain mengutamakan landasan berbagai macam indikator makro seperti: PDRB, inflasi, investasi, ekspor–impor, dan lain–lain, sesuai dengan sifatnya yang ditujukan untuk memberikan “warning”. Penggunaan indikator makro ke dalam bentuk perencanaan program yang lebih spesifik memerlukan kajian empiris sehingga dapat diidentifikasi aspek pertumbuhan, keterbandingan antarwilayah, dan pemerataan pembangunan. Aspek pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat menyerap angkatan kerja yang secara alamiah terus bertambah. Meningkatnya serapan tenaga kerja diharapkan berdampak terjadinya pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, analisis PDRB dengan menggunakan data pada level provinsi dan kabupaten/kota ini disusun dalam rangka memfasilitasi kebutuhan para penentu kebijakan (decision maker) dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi, bahkan sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu proses penyusunan penelitian ini adalah

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Variabel	Model	Hasil Penelitian
Denny Cessario Sutrisno (2013)	Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, Dan Pdrb Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dependen: Retribusi Pariwisata ▪ Independen: Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, PDRB 	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode kuadrat terkecil (<i>Pooled Least Square</i>), metode efek tetap (<i>fixed effect</i>) dan metode efek random (<i>random effect</i>).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh variabel Independen yang digunakan, yaitu jumlah obyak wisata, jumlah hotel dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu retribusi pariwisata
Novi Dwi Purwanti, Retno Mustika Dewi (2014)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dependen: Pendapatan Asli Daerah ▪ Independen: Jumlah Kunjungan Wisatawan 	Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Fraenkel dan Wallen (2008) menyebutkan penelitian korelasi ke dalam penelitian deskripsi karena penelitian tersebut merupakan usaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten Mojokerto karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2011

Nama Penulis	Judul	Variabel	Model	Hasil Penelitian
Arif Wahyu Isnaini	Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dependen: Pendapatan Asli Daerah ▪ Independen: Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pendapatan Per Kapita 	<p>Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif sehingga alat analisis yang digunakan juga merupakan alat analisis deskriptif kuantitatif. Ada beberapa pendekatan atau metode yang digunakan diantaranya: analisa model regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji statistik, dan uji koefisien determinasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara bersama-sama variabel independen sektor pariwisata tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. ▪ Secara parsial masing-masing individu variabel bebasnya maka dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan paling besar terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah adalah variabel jumlah obyek wisata.

Nama Penulis	Judul	Variabel	Model	Hasil Penelitian
I Wayan Gede Sedana Putra (2011)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Retribusi Obyek Wisata, Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pembangunan Kabupaten Gianyar tahun 1991 – 2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dependen: anggaran pendapatan daerah. Independen: Jumlah wisatwan, Rertibusi obyek wisata, Pendapatan Asli Daerah 	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung. Disamping menggunakan metode kuantitatif penelitian ini juga menggunakan metode analisis jalur (Path Analisis), dengan menggunakan 4 (empat) variabel pengukuran, yaitu jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah (PAD) dan Anggaran Pembangunan daerah Kabupaten Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara keseluruhan variabel retribusi obyek wisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah, hanya variabel jumlah kunjungan wisatawan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan.

Nama Penulis	Judul	Variabel	Model	Hasil Penelitian
Ni LuhGede Ana Pertiwi (2014)	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata Dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dependen: Pendapatan Asli Daerah ▪ Independen: jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran 	Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda dengan data time series yang diolah menggunakan program SPSS for windows 16.0 .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara serempak atau simultan, jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan retribusi obyek wisata, pajak hotel dan restoran memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 1993-2012. ▪ Jumlah Kunjungan wisatawan, Pendapatan Retribusi obyek wisata, Pajak Hotel dan Restoran masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar tahun 1992- 2012 secara parsial.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Jumlah obyek wisata terhadap pendapatan retribusi

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, dilakukan ketika sudah seminggu atau sebulan penuh melakukan pekerjaan atau kegiatan yang padat maka seseorang butuh pergi wisata, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Menurut Murti Handayani (2012) Pariwisata dapat mempengaruhi adanya kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Dari sudut sosial bahwa kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kepariwisataan. Segi ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari parawisatawan mancanegara yang berkunjung.

Sehingga, semakin banyak jumlah Obyek Pariwisata maka semakin banyak pula sumbangan dari pendapatan retribusi yang diperoleh dari masing-masing obyek wisata tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Denny Cessario Sutrisno (2013) yang menyimpulkan bahwa

jumlah obyek wisata memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan retribusi pariwisata.

2. Jumlah wisatawan terhadap pendapatan retribusi

Jumlah Wisatawan yang berkunjung di DIY selalu mengalami peningkatan karena para pengunjung tidak hanya berasal dari DIY melainkan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Setiap wisatawan yang berkunjung ke tempat pariwisata dapat menikmati keindahan dan panorama yang ada di DIY, tentunya dengan membayar biaya retribusi yang telah ditetapkan di masing-masing obyek wisata yang mereka pilih.

Oleh karena itu, semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka akan semakin banyak pula retribusi obyek wisata yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Murti Handayani (2012) yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata, karena dengan jumlah wisatawan yang tinggi maka dapat menambah pendapatan retribusi.

3. Jumlah PDRB terhadap pendapatan retribusi

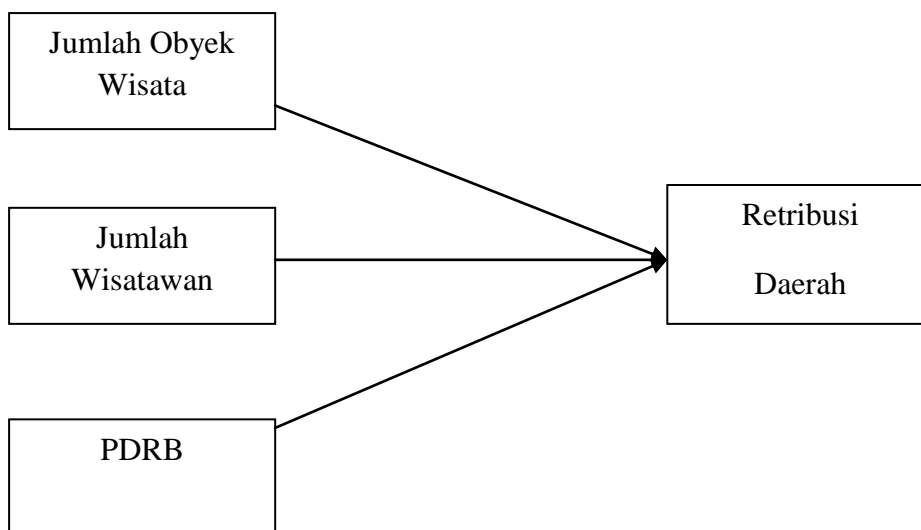
PDRB di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar.

Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata.

Sehingga semakin besar kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, maka pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan retribusi obyek wisata, karena mereka harus membayarkan biaya retribusi di setiap obyek wisata yang mereka kunjungi.

D. Kerangka penelitian

Skema hubungan Retribusi Daerah dengan Variabel yang mempengaruhinya.



Gambar 1.1
Kerangka Penelitian

E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah Obyek Wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Retribusi di 5 kota/kabupaten di DIY
2. Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Retribusi di 5 kota/kabupaten di DIY
3. Jumlah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Retribusi di 5 kota/kabupaten di DIY